BUPATI ACEH SELATAN

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN
NOMOR 7 TAHUN 2026

TENTANG

TATA CARA PENETAPAN, PEMBAGIAN BESARAN DAN PELAKSANAAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH UNTUK GAMPONG DALAM KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN ANGGARAN 2026

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

BUPATI ACEH SELATAN,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan ketentuan Pasal 97 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu mengatur tata cara penetapan dan pembagian besaran serta petunjuk pelaksanaan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah untuk Gampong Tahun Anggaran 2025 dalam suatu Peraturan Bupati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Selatan tentang Tata Cara Penetapan, Pembagian Besaran serta Petunjuk Pelaksanaan Bagi Hasil Pajak dan retribusi Daerah untuk Gampong Dalam Kabupaten Aceh Selatan Tahun Anggaran 2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kabupaten Aceh Selatan Di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6932);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6883);

12. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan Keuchik di Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 4);
13. Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Gampong (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Nomor 3);
14. Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Nomor 1);
15. Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 1 Tahun 2026 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Kabupaten Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Kabupaten Nomor 1);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Tahun 2026 Nomor 99);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENETAPAN, PEMBAGIAN BESARAN DAN PELAKSANAAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH UNTUK GAMPONG DALAM KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN ANGGARAN 2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Aceh Selatan yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari daerah provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintah daerah kabupaten yang terdiri atas bupati dan perangkat daerah kabupaten.
3. Bupati Aceh Selatan yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokrasi yang dilakukan

berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Pemerintah Kabupaten dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan.

5. Camat adalah pimpinan dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang pada pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan dari bupati/walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

6. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada dibawah mukim dan dipimpin oleh Keuchik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri.

7. Pemerintahan Gampong adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Gampong dan Tuha Peut Gampong dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Pemerintah Gampong adalah Keuchik dan Perangkat Gampong sebagai unsur penyelenggara pemerintahan gampong.

9. Keuchik adalah kepala persekutuan masyarakat adat gampong yang bertugas menyelenggarakan pemerintahan gampong, melestarikan adat istiadat dan hukum adat, serta menjaga keamanan, kerukunan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.

10. Tuha Peut Gampong adalah lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan gampong sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan gampong yang terdiri dari unsur ulama, tokoh adat, pemuka masyarakat dan cerdik pandai yang ada di gampong.

11. Rencana Pembangunan Jangka Pendek Gampong yang selanjutnya disingkat RPJP adalah hasil musyawarah masyarakat gampong tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk periode 1 (satu) tahun.

12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong yang selanjutnya disingkat RPJMG adalah Dokumen Perencanaan Gampong untuk periode 6 (enam) tahun.

13. Qanun Gampong adalah peraturan-peraturan, petunjuk-petunjuk, adat istiadat yang dibuat oleh Tuha Peut Gampong bersama Keuchik.

14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disebut APBK adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan kabupaten yang ditetapkan dengan Qanun Kabupaten.

15. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau

Badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah.

16. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

17. Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBK yang dialokasikan kepada gampong berdasarkan angka presentase untuk mendanai kebutuhan gampong.

18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong yang selanjutnya disingkat APBG adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan gampong yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Gampong dan Tuha Peut Gampong yang ditetapkan dengan Qanun Gampong.

19. Keuangan Gampong adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintah gampong yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban gampong tersebut.

20. Pengelolaan Keuangan Gampong adalah seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan gampong.

21. Tim Pelaksana di tingkat Gampong yang selanjutnya disebut Timlak adalah Tim yang dibentuk oleh Keuchik yang bertugas melaksanakan kegiatan fisik yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong.

22. Pembinaan adalah pemberian pedoman standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan gampong.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Maksud diberikannya Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi Daerah untuk Gampong adalah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan gampong dan pembinaan kemasyarakatan gampong.

(2) Tujuan diberikannya Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi Daerah untuk Gampong adalah:
   a. mewujudkan pemerintahan gampong yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung-jawab;

b. meningkatkan nilai-nilai keagamaan, adat dan sosial budaya dalam rangka penguatan pemerintahan gampong;
c. menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan
d. memajukan perekonomian masyarakat gampong serta pemberdayaan masyarakat gampong;
e. meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat gampong guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;
f. mengefektifkan perencanaan pembangunan gampong dengan mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat gampong untuk pengembangan potensi dan aset gampong guna kesejahteraan bersama;
g. meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat gampong guna mewujudkan masyarakat gampong yang mampu memelihara kesatuan sosial;
h. mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat dalam pembangunan gampong; dan
i. meningkatkan pendapatan gampong dan ekonomi masyarakat gampong melalui Badan Usaha Milik Gampong.

BAB III
SUMBER PENDANAAN DAN PENENTUAN BESARAN

Paragraf Kesatu
Sumber Dana

Pasal 3

(1) Pemerintah Kabupaten mengalokasikan bagi hasil pajak kepada gampong.

(2) Pendanaan Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi Daerah untuk Gampong bersumber dari APBK.

Paragraf Kedua
Bagi Hasil Pajak Daerah

Pasal 4

(1) Besaran Bagi Hasil Pajak untuk Gampong ditetapkan sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun Anggaran 2026.

(2) Sumber Bagi Hasil Pajak Daerah untuk Gampong berasal dari penerimaan pajak daerah yang diterima oleh daerah melalui kas daerah.

(3) Pengalokasian Bagi Hasil Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan:
a. 60% (enam puluh per seratus) dibagi secara merata kepada seluruh gampong; dan

b. 40% (empat puluh per seratus) dibagi secara proporsional realisasi penerimaan hasil pajak dari masing-masing gampong.

(4) Besaran Bagi Hasil Pajak Daerah setiap gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sebagai berikut:
a. 60% (enam puluh per seratus) dibagi secara merata sejumlah gampong, dengan cara (10% x Hasil Pajak Daerah x 60%) / Jumlah gampong se-Kabupaten.
b. 40% (empat puluh per seratus) dibagi secara proporsional untuk gampong sesuai kontribusi pemasukan pajak daerah dari masing-masing gampong terhadap total pemasukan pajak gampong se-Kabupaten, dengan cara (10% x Hasil Pajak Daerah x 40%) x (jumlah pemasukan pajak daerah dari gampong yang bersangkutan / total pemasukan pajak daerah dari gampong se-Kabupaten).

Paragraf Ketiga
Bagi Hasil Retribusi Daerah

Pasal 5

(1) Besaran Bagi Hasil Retribusi untuk Gampong ditetapkan sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun Anggaran 2026.

(2) Sumber Bagi Hasil Retribusi Daerah untuk Gampong berasal dari penerimaan retribusi yang diterima oleh daerah melalui kas daerah.

(3) Pengalokasian Bagi Hasil Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan:
a. 60% (enam puluh per seratus) dibagi secara merata kepada seluruh gampong; dan
b. 40% (empat puluh per seratus) dibagi secara proporsional realisasi penerimaan hasil retribusi dari masing-masing gampong.

(4) Besaran Bagi Hasil Retribusi Daerah setiap gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sebagai berikut:
a. 60% (enam puluh per seratus) dibagi secara merata sejumlah gampong, dengan cara (10% x Hasil Retribusi Daerah x 60%) / Jumlah gampong se-Kabupaten; dan
b. 40% (empat puluh per seratus) dibagi secara proporsional untuk gampong sesuai kontribusi pemasukan retribusi daerah dari masing-masing gampong terhadap total pemasukan retribusi gampong se-Kabupaten, dengan cara (10% x Hasil Retribusi Daerah x 40%) x (jumlah pemasukan retribusi daerah dari gampong yang bersangkutan/total pemasukan retribusi daerah dari gampong se-Kabupaten).

Pasal 6

(1) Sumber data dalam perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dan Pasal 5 ayat (3) adalah:
   a. nama dan kode wilayah gampong bersumber dari Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten; dan
   b. jumlah pemasukan pajak dan retribusi masing-masing gampong dan atau rekapitulasi setiap kecamatan bersumber dari Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten.

(2) Besaran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah untuk masing-masing gampong dalam Kabupaten Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PEMBINAAN, PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 7

(1) Pemerintah Kabupaten wajib membina, mengawasi, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi Daerah untuk Gampong.

(2) Pembinaan, pengawasan, evaluasi dan monitoring dilakukan oleh Tim Fasilitasi dan Tim Pendamping.

Pasal 8

(1) Ditingkat Kabupaten dibentuk Tim Koordinasi yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.

(2) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
   a. melaksanakan sosialisasi kebijakan, data dan informasi mengenai Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi Daerah untuk Gampong;
   b. melakukan fasilitasi penyelesaian masalah berdasarkan pengaduan masyarakat dan/atau pihak lain;
   c. melakukan kegiatan pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi Daerah untuk Gampong; dan
   d. memberikan laporan kepada Bupati.

Pasal 9

(1) Ditingkat Kecamatan dibentuk Tim Fasilitasi yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.

(2) Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:

a. melakukan verifikasi kelayakan permohonan penyaluran Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi Daerah untuk Gampong;
b. melakukan pembinaan, perencanaan dan pelaksanaan Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi Daerah untuk Gampong;
c. melakukan pembinaan administrasi keuangan gampong;
d. melakukan pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi; dan
e. memberikan laporan kepada Tim Koordinasi.

Pasal 10

(1) Keuchik dapat membentuk Tim/Panitia Pelaksana/ Pengelola pada tiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan gampong, pelaksanaan pembangunan gampong, pembinaan kemasyarakatan gampong.

(2) Tim/Panitia Pelaksana/Pengelola Kegiatan ditetapkan dengan Keputusan Keuchik.

BAB V
PERSYARATAN PENGAJUAN

Pasal 11

(1) Persyaratan pengajuan permohonan penyaluran Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi Daerah untuk Gampong sebagai berikut:
a. telah diverifikasi dan direkomendasikan layak untuk mengajukan permohonan penyaluran oleh Tim Fasilitasi dengan berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:
1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) telah ditetapkan, serta telah dilakukan evaluasi oleh Pemerintah Kabupaten dan / atau didelegasikan kepada Camat.
2. semua pekerjaan/kegiatan tahun dan atau tahap sebelumnya telah dilaksanakan, dilaporkan, dan dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. telah melakukan pemungutan dan penyetoran PBB berdasarkan target kinerja sesuai ketentuan, untuk tahun sebelumnya dan/atau tahun berkenaan; dan
4. mematuhi kebijakan-kebijakan Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Aceh, dan Pemerintah.

b. melengkapi/mencukupi dokumen sebagai berikut:
1. permohonan penyaluran dari Keuchik/Pj. Keuchik kepada Bupati;
2. fotokopi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Gampong (untuk pengajuan tahap I);
3. fotokopi Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Gampong (untuk pengajuan tahap I);
4. fotokopi Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) (untuk pengajuan tahap I dan tahap II/akhir bila ada perubahan APBG);

5. fotokopi Surat Keputusan (SK) Penunjukan Bank sebagai Penyimpan dan Pencairan (dilegalisir Keuchik/Pj. Keuchik);
6. fotokopi rekening kas gampong (mengetahui Keuchik/Pj. Keuchik);
7. fotokopi Surat Keputusan (SK) Pengangkatan Keuchik.
8. fotokopi Surat Keputusan (SK) Bendahara Gampong (dilegalisir Keuchik/Pj. Keuchik);
9. fotokopi KTP Keuchik/Pj. Keuchik, dan Bendahara Gampong;
10. pakta integritas bermeterai cukup;
11. kwitansi penerimaan bermeterai cukup.

(2) Pengecualian dari persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 dapat dilakukan dengan persetujuan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.

BAB VI
MEKANISME PENYALURAN

Pasal 12

(1) Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi Daerah untuk Gampong dianggarkan setiap tahun dalam APBK.

(2) Bupati menetapkan besaran sementara Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi Daerah untuk Gampong untuk masing-masing gampong setiap awal tahun anggaran.

(3) Pemerintah Gampong membuka rekening kas gampong pada Bank diwilayahnya atau yang terdekat.

(4) Keuchik mengajukan permohonan penyaluran Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi Daerah untuk Gampong kepada Bupati melalui Camat.

(5) Camat meneruskan permohonan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kabupaten setelah terlebih dahulu dilakukan verifikasi oleh Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan.

(6) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kabupaten meneruskan berkas permohonan penyaluran berikut lampirannya kepada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten.

(7) Penyaluran Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi Daerah untuk Gampong dilaksanakan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten dengan persetujuan Bupati melalui Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Gampong.

(8) Bentuk persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati.

(9) Penyaluran Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi Daerah untuk Gampong melalui Bank 100%, dengan tahapan yaitu:

a. tahap I pada bulan Juni, sebesar 40% (empat puluh per seratus); dan
b. tahap II pada bulan November, sebesar 60% (enam puluh per seratus).

(10) Penyaluran Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dapat digabungkan bila tahap sebelumnya tidak terealisasi.

(11) Dalam hal terjadi selisih perhitungan diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati berdasarkan perhitungan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten.

(12) Apabila terjadi kekurangan atau kelebihan penyaluran Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi Daerah untuk Gampong pada akhir tahun anggaran berjalan maka akan diperhitungkan pada tahun anggaran berikutnya.

BAB VII
PENGGUNAAN

Pasal 13

(1) Penggunaan Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi Daerah untuk Gampong diprioritaskan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan gampong dan pembinaan kemasyarakatan gampong.

(2) Penggunaan Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi Daerah untuk Gampong mengacu pada RPJMG dan RKPG.

BAB VIII
PENGELOLAAN

Pasal 14

(1) Pengelolaan keuangan gampong dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

(2) Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi Daerah untuk Gampong merupakan bagian dari sumber pendapatan gampong.

(3) Besaran Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi Daerah untuk Gampong dituangkan dalam Qanun Gampong tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong.

(4) Keuchik atau Penjabat Keuchik sebagai pemegang kekuasaan keuangan gampong bertanggungjawab atas pelaksanaan pengelolaan Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi Daerah untuk Gampong.

Pasal 15

(1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBG harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

(2) Pengeluaran kas gampong yang mengakibatkan beban APBG tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan

Qanun Gampong tentang APBG ditetapkan menjadi Qanun Gampong.

(3) Bendahara Gampong sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Kegiatan yang dibiayai dengan Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi Daerah untuk Gampong harus direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi secara transparan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

(1) Pelaksanaan pengelolaan Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi Daerah untuk Gampong menggunakan prinsip hemat, terarah, dan terkendali.

(2) Setiap penerimaan dan pengeluaran dana dicatat dalam Buku Kas Umum dan Buku Kas Pembantu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, secara teknis dilakukan oleh Bendahara Gampong.

BAB IX
PELAPORAN

Pasal 18

(1) Keuchik menyampaikan laporan realisasi penggunaan Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi Daerah setiap akhir tahun anggaran kepada Tim Fasilitasi paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

(2) Tim Fasilitasi melaporkan kepada Bupati melalui Tim Koordinasi.

(3) Dalam hal Keuchik tidak atau terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat menunda penyaluran dana.

BAB X
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 19

Pertanggungjawaban Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi Daerah terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBG.

BAB XI
PENGAWASAN

Pasal 20

Pengawasan terhadap kegiatan yang didanai dari Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi Daerah dilakukan secara fungsional oleh pejabat yang berwenang dan oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Selatan.

Ditetapkan di Tapaktuan
pada tanggal 9 Maret 2026 M
Ramadhan 1447 H

BUPATI ACEH SELATAN,

MIRWAN MS

Diundangkan di Tapaktuan
pada tanggal 9 Maret 2026 M
Ramadhan 1447 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN,

DIVA SAMUDRA PUTRA

BERITA KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN 2026 NOMOR ..

LAMPIRAN :
PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN
NOMOR 7 TAHUN 2026
TENTANG TATA CARA PENETAPAN, PEMBAGIAN BESARAN DAN PELAKSANAAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH UNTUK GAMPONG DALAM KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN ANGGARAN 2026.

RINCIAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH SETIAP GAMPONG
DALAM KABUPATEN ACEH SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2026

No	Kode Wilayah	Nama Gampong	Kecamatan	Pagu Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah					
				Bagi Hasil Pajak Daerah	Bagi Hasil Retribusi Daerah	BHPD Kurang Bayar Tahun 2024	BHRD Kurang Bayar Tahun 2024	BHRD Kurang Bayar Tahun 2023	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	11.01.01.2001	KEUDE BAKONGAN	BAKONGAN	20.496.127	4.833.449	4.937.255	7.103.307	2.599.443	39.969.581
2	11.01.01.2002	UJONG MANGKI	BAKONGAN	21.444.942	634.541	4.897.129	5.919.564	2.166.254	35.062.430
3	11.01.01.2003	UJONG PADANG	BAKONGAN	8.318.324	634.541	4.085.142	5.919.564	2.166.254	21.123.825
4	11.01.01.2004	GAMPONG DRIEN	BAKONGAN	8.318.324	634.541	3.850.412	5.919.564	2.166.254	20.889.095
5	11.01.01.2015	DARUL IKHSAN	BAKONGAN	8.318.324	634.541	2.569.214	5.919.564	2.166.254	19.607.897
6	11.01.01.2016	PADANG BEURAHAN	BAKONGAN	8.318.324	634.541	3.252.571	5.919.564	2.166.254	20.291.254
7	11.01.01.2017	GAMPONG BARO	BAKONGAN	9.853.019	634.541	4.638.531	5.919.564	2.166.254	23.211.909
8	11.01.02.2001	FAJAR HARAPAN	KLUET UTARA	8.318.324	634.541	2.961.566	5.919.564	2.166.254	20.000.249
9	11.01.02.2002	KRUENG BATEE	KLUET UTARA	8.318.324	634.541	2.832.518	5.919.564	2.166.254	19.871.201
10	11.01.02.2003	PASI KUALA ASAHAN	KLUET UTARA	9.622.815	634.541	3.009.183	5.919.564	2.166.254	21.352.357
11	11.01.02.2004	GUNONG PULO	KLUET UTARA	8.318.324	634.541	3.777.856	5.919.564	2.166.254	20.816.539
12	11.01.02.2005	PULO IE I	KLUET UTARA	8.318.324	634.541	2.618.372	5.919.564	2.166.254	19.657.055
13	11.01.02.2006	JAMBO MANYANG	KLUET UTARA	8.318.324	634.541	3.250.080	5.919.564	2.166.254	20.288.763
14	11.01.02.2007	SIMPANG EMPAT	KLUET UTARA	8.318.324	4.804.491	4.008.868	19.177.484	7.017.968	43.327.135
15	11.01.02.2008	LIMAUPURUT	KLUET UTARA	12.392.939	634.541	4.024.384	5.919.564	2.166.254	25.137.682
16	11.01.02.2009	PULO KAMBING	KLUET UTARA	8.318.324	634.541	4.412.463	5.919.564	2.166.254	21.451.146
17	11.01.02.2010	KAMPUNG PAYA	KLUET UTARA	8.318.324	634.541	2.728.637	5.919.564	2.166.254	19.767.320
18	11.01.02.2011	KRUENG BATU	KLUET UTARA	8.318.324	634.541	2.540.440	5.919.564	2.166.254	19.579.123
19	11.01.02.2012	KRUENG KLUET	KLUET UTARA	8.318.324	634.541	2.514.621	5.919.564	2.166.254	19.553.304
20	11.01.02.2013	ALURMAS	KLUET UTARA	8.318.324	634.541	3.729.777	5.919.564	2.166.254	20.768.460
21	11.01.02.2014	KAMPUNG TINGGI	KLUET UTARA	12.346.898	634.541	4.384.698	5.919.564	2.166.254	25.451.955
22	11.01.02.2015	RUAK	KLUET UTARA	8.318.324	634.541	4.133.607	5.919.564	2.166.254	21.172.290
23	11.01.02.2016	SIMPANG LHEE	KLUET UTARA	8.318.324	634.541	3.031.211	5.919.564	2.166.254	20.069.894
24	11.01.02.2017	SUAQ GERINGGENG	KLUET UTARA	24.202.415	634.541	2.556.476	5.919.564	2.166.254	35.479.250
25	11.01.02.2018	PASI KUALA BA'U	KLUET UTARA	8.318.324	634.541	3.456.286	5.919.564	2.166.254	20.494.969
26	11.01.02.2019	KEDAI PADANG	KLUET UTARA	8.318.324	634.541	2.521.218	5.919.564	2.166.254	19.559.901
27	11.01.02.2020	KOTAFAJAR	KLUET UTARA	20.329.868	22.166.539	5.543.692	74.831.155	27.384.334	150.255.588
28	11.01.02.2021	GUNUNG PUDUNG	KLUET UTARA	48.703.678	634.541	3.618.488	5.919.564	2.166.254	61.042.525
29	11.01.03.2018	SUAQ BAKUNG	KLUET SELATAN	8.318.324	634.541	4.216.515	5.919.564	2.166.254	21.255.198
30	11.01.03.2002	RANTAU BINUANG	KLUET SELATAN	24.877.936	634.541	3.904.789	5.919.564	2.166.254	37.503.084
31	11.01.03.2003	BARAT DAYA	KLUET SELATAN	8.318.324	634.541	2.521.378	5.919.564	2.166.254	19.560.061
32	11.01.03.2004	SIALANG	KLUET SELATAN	8.318.324	634.541	3.735.953	5.919.564	2.166.254	20.774.636
33	11.01.03.2005	KAPEH	KLUET SELATAN	13.514.289	634.541	5.468.687	5.919.564	2.166.254	27.703.335
34	11.01.03.2006	PULO IE	KLUET SELATAN	10.809.645	634.541	3.614.690	5.919.564	2.166.254	23.144.694
35	11.01.03.2007	KEDAI RUNDING	KLUET SELATAN	8.318.324	1.213.701	3.376.308	13.022.021	4.765.386	30.695.740
36	11.01.03.2008	KEDAI KANDANG	KLUET SELATAN	10.008.535	634.541	3.133.719	5.919.564	2.166.254	21.862.613
37	11.01.03.2009	GAMPONG LUAR	KLUET SELATAN	22.764.252	634.541	3.102.506	5.919.564	2.166.254	34.587.117
38	11.01.03.2010	UJUNG	KLUET SELATAN	9.648.393	634.541	2.905.360	5.919.564	2.166.254	21.274.112
39	11.01.03.2011	JUA	KLUET SELATAN	8.318.324	634.541	3.852.224	5.919.564	2.166.254	20.890.907
40	11.01.03.2012	PASI MEURAPAT	KLUET SELATAN	8.318.324	634.541	2.883.701	5.919.564	2.166.254	19.922.384
41	11.01.03.2013	UJUNG PASIR	KLUET SELATAN	8.318.324	634.541	2.995.608	5.919.564	2.166.254	20.034.291
42	11.01.03.2014	GEULUMBUK	KLUET SELATAN	8.318.324	634.541	4.389.364	5.919.564	2.166.254	21.428.047
43	11.01.03.2015	PASIE LEMBANG	KLUET SELATAN	22.007.801	634.541	6.910.169	5.919.564	2.166.254	37.638.329
44	11.01.03.2016	UJUNG PADANG	KLUET SELATAN	8.318.324	634.541	4.031.840	5.919.564	2.166.254	21.070.523
45	11.01.03.2017	INDRA DAMAI	KLUET SELATAN	8.318.324	634.541	5.123.194	5.919.564	2.166.254	22.161.877
46	11.01.04.2001	BAKAU HULU	LABUHANHAJI	38.907.573	634.541	4.733.742	5.919.564	2.166.254	52.361.674
47	11.01.04.2002	PADANG BAKAU	LABUHANHAJI	8.318.324	634.541	4.806.640	5.919.564	2.166.254	21.845.323
48	11.01.04.2003	MANGGIS HARAPAN	LABUHANHAJI	15.224.450	634.541	3.810.815	5.919.564	2.166.254	27.755.624
49	11.01.04.2004	PASAR LAMA	LABUHANHAJI	28.357.857	634.541	3.812.444	204.906.740	74.985.274	312.696.856
50	11.01.04.2005	APHA	LABUHANHAJI	32.090.746	634.541	4.172.808	5.919.564	2.166.254	44.983.913
51	11.01.04.2006	UJUNG BATU	LABUHANHAJI	8.574.107	634.541	4.665.760	5.919.564	2.166.254	21.960.226
52	11.01.04.2007	PAWOH	LABUHANHAJI	8.574.107	634.541	3.620.499	5.919.564	2.166.254	20.914.965
53	11.01.04.2008	DALAM	LABUHANHAJI	8.318.324	634.541	2.981.604	5.919.564	2.166.254	20.020.287
54	11.01.04.2009	KOTA PALAK	LABUHANHAJI	8.318.324	634.541	4.459.298	5.919.564	2.166.254	21.497.981
55	11.01.04.2010	CACANG	LABUHANHAJI	27.189.442	634.541	3.912.757	5.919.564	2.166.254	39.822.558
56	11.01.04.2011	TENGAH PISANG	LABUHANHAJI	8.318.324	634.541	3.422.354	5.919.564	2.166.254	20.461.037
57	11.01.04.2012	PISANG	LABUHANHAJI	42.038.126	634.541	4.105.717	5.919.564	2.166.254	54.864.202
58	11.01.04.2013	HULU PISANG	LABUHANHAJI	8.318.324	634.541	4.736.082	5.919.564	2.166.254	21.774.765
59	11.01.04.2014	TENGAH BARU	LABUHANHAJI	14.373.206	634.541	3.873.516	5.919.564	2.166.254	26.967.081
60	11.01.04.2015	LEMBAH BARU	LABUHANHAJI	8.318.324	634.541	3.005.535	5.919.564	2.166.254	20.044.218
61	11.01.04.2016	PADANG BARU	LABUHANHAJI	8.482.025	634.541	3.429.099	5.919.564	2.166.254	20.631.483
62	11.01.05.2024	KUTA BULOH II	MEUKEK	8.318.324	634.541	4.264.435	5.919.564	2.166.254	21.303.118
63	11.01.05.2002	KUTA BULOH I	MEUKEK	22.176.618	634.541	3.797.335	5.919.564	2.166.254	34.694.312
64	11.01.05.2003	IE DINGEN	MEUKEK	8.318.324	634.541	2.830.301	5.919.564	2.166.254	19.868.984

No	Kode Wilayah	Nama Gampong	Kecamatan	Pagu Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah					
				Bagi Hasil Pajak Daerah	Bagi Hasil Retribusi Daerah	BHPD Kurang Bayar Tahun 2024	BHRD Kurang Bayar Tahun 2024	BHRD Kurang Bayar Tahun 2023	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
65	11.01.05.2004	DRIEN JALO	MEUKEK	8.318.324	634.541	3.550.907	5.919.564	2.166.254	20.589.590
66	11.01.05.2005	JAMBO PAPEUN	MEUKEK	8.318.324	634.541	4.149.148	5.919.564	2.166.254	21.187.831
67	11.01.05.2006	BUKIT MEUH	MEUKEK	8.318.324	634.541	3.968.604	5.919.564	2.166.254	21.007.287
68	11.01.05.2007	BLANG KUALA	MEUKEK	22.031.845	634.541	4.507.722	5.919.564	2.166.254	35.259.926
69	11.01.05.2008	ROT TEUNGOH	MEUKEK	15.356.690	634.541	4.766.146	5.919.564	2.166.254	28.843.195
70	11.01.05.2009	ALUE BARO	MEUKEK	8.318.324	634.541	3.270.921	5.919.564	2.166.254	20.309.604
71	11.01.05.2010	LADANG TUHA	MEUKEK	8.318.324	634.541	3.672.641	5.919.564	2.166.254	20.711.324
72	11.01.05.2011	LHOK MAMPLAM	MEUKEK	8.318.324	634.541	2.921.103	5.919.564	2.166.254	19.959.786
73	11.01.05.2012	ARUN TUNGGAI	MEUKEK	25.693.115	634.541	4.337.393	5.919.564	2.166.254	38.750.867
74	11.01.05.2013	BLANG TEUNGOH	MEUKEK	15.930.410	634.541	3.825.161	5.919.564	2.166.254	28.475.930
75	11.01.05.2014	BLANG BLADEH	MEUKEK	8.318.324	634.541	4.638.784	5.919.564	2.166.254	21.677.467
76	11.01.05.2015	IE BUBOH	MEUKEK	14.946.671	634.541	3.581.752	5.919.564	2.166.254	27.248.782
77	11.01.05.2016	KEUDE MEUKEK	MEUKEK	27.358.770	634.541	3.495.586	5.919.564	2.166.254	39.574.715
78	11.01.05.2017	KUTA BARO	MEUKEK	8.318.324	2.082.440	3.868.526	26.931.000	9.855.354	51.055.644
79	11.01.05.2018	TANJUNG HARAPAN	MEUKEK	25.282.328	634.541	5.244.019	5.919.564	2.166.254	39.246.706
80	11.01.05.2019	LABUHAN TAROK	MEUKEK	8.318.324	4.087.780	5.025.722	16.573.250	6.064.952	40.070.028
81	11.01.05.2020	LHOK AMAN	MEUKEK	8.318.324	634.541	3.217.981	5.919.564	2.166.254	20.256.664
82	11.01.05.2021	ALUE MEUTUAH	MEUKEK	8.318.324	634.541	3.367.637	5.919.564	2.166.254	20.406.320
83	11.01.05.2022	LADANG BARO	MEUKEK	8.318.324	634.541	3.093.113	5.919.564	2.166.254	20.131.796
84	11.01.05.2023	LABUHAN TAROK II	MEUKEK	14.303.634	634.541	4.005.369	5.919.564	2.166.254	27.029.362
85	11.01.06.2001	DALAM	SAMADUA	15.922.737	634.541	2.998.334	5.919.564	2.166.254	27.641.430
86	11.01.06.2002	SUBARANG	SAMADUA	13.024.721	634.541	3.077.577	5.919.564	2.166.254	24.822.657
87	11.01.06.2003	KOTA BARU	SAMADUA	12.487.578	634.541	3.197.726	5.919.564	2.166.254	24.405.663
88	11.01.06.2004	GUNUNG KETEK	SAMADUA	8.318.324	634.541	3.616.311	5.919.564	2.166.254	20.654.994
89	11.01.06.2005	LADANG PANTON LUAS	SAMADUA	8.318.324	634.541	3.079.797	5.919.564	2.166.254	20.118.480
90	11.01.06.2006	MADAT	SAMADUA	17.335.065	634.541	2.915.607	5.919.564	2.166.254	28.971.031
91	11.01.06.2007	ALUR SUMERAH	SAMADUA	8.318.324	634.541	3.397.317	5.919.564	2.166.254	20.436.000
92	11.01.06.2008	TENGAH	SAMADUA	12.451.666	634.541	2.796.556	5.919.564	2.166.254	23.968.581
93	11.01.06.2009	GUNUNG CUT	SAMADUA	8.318.324	634.541	3.732.439	5.919.564	2.166.254	20.771.122
94	11.01.06.2010	ALUR PINANG	SAMADUA	8.318.324	634.541	4.198.740	5.919.564	2.166.254	21.237.423
95	11.01.06.2011	KUTA BLANG	SAMADUA	8.318.324	634.541	4.167.556	5.919.564	2.166.254	21.206.239
96	11.01.06.2012	BATEE TUNGGAI	SAMADUA	15.991.798	634.541	4.711.024	5.919.564	2.166.254	29.423.181
97	11.01.06.2013	UJUNG TANAH	SAMADUA	13.229.347	634.541	5.819.740	5.919.564	2.166.254	27.769.446
98	11.01.06.2014	UJUNG KAMPUNG	SAMADUA	14.764.042	634.541	3.051.196	5.919.564	2.166.254	26.535.597
99	11.01.06.2015	JILATANG	SAMADUA	15.394.546	634.541	3.369.504	5.919.564	2.166.254	27.484.409
100	11.01.06.2016	LUAR	SAMADUA	14.240.711	634.541	3.409.033	5.919.564	2.166.254	26.370.103
101	11.01.06.2017	LUBUK LAYU	SAMADUA	8.318.324	634.541	4.754.998	5.919.564	2.166.254	21.793.681
102	11.01.06.2018	SUAQ HULU	SAMADUA	27.538.979	634.541	3.995.682	5.919.564	2.166.254	40.255.020
103	11.01.06.2019	TAMPANG	SAMADUA	8.318.324	634.541	4.713.736	5.919.564	2.166.254	21.752.419
104	11.01.06.2020	PAYONAN GADANG	SAMADUA	29.500.181	634.541	3.427.778	5.919.564	2.166.254	41.648.318
105	11.01.06.2021	GADANG	SAMADUA	23.190.028	634.541	4.131.216	5.919.564	2.166.254	36.041.603
106	11.01.06.2022	BARU	SAMADUA	36.732.942	634.541	4.968.911	5.919.564	2.166.254	50.422.212
107	11.01.06.2023	LADANG KASIK PUTIH	SAMADUA	8.318.324	1.121.035	3.107.421	14.572.724	5.332.864	32.452.368
108	11.01.06.2024	AIR SIALANG HILIR	SAMADUA	17.720.887	634.541	3.088.208	5.919.564	2.166.254	29.529.454
109	11.01.06.2025	AIR SIALANG HULU	SAMADUA	13.234.207	634.541	4.630.264	5.919.564	2.166.254	26.584.830
110	11.01.06.2026	AIR SIALANG TENGAH	SAMADUA	23.891.383	634.541	3.683.363	5.919.564	2.166.254	36.295.105
111	11.01.06.2027	BALAI	SAMADUA	9.955.332	634.541	3.602.646	5.919.564	2.166.254	22.278.337
112	11.01.06.2028	ARAFAH	SAMADUA	27.250.063	634.541	4.359.185	5.919.564	2.166.254	40.329.607
113	11.01.07.2001	SIKULAT	SAWANG	8.318.324	634.541	3.786.626	5.919.564	2.166.254	20.825.309
114	11.01.07.2002	SAWANG I	SAWANG	8.318.324	634.541	4.364.463	5.919.564	2.166.254	21.403.146
115	11.01.07.2003	MEULIGO	SAWANG	8.676.420	634.541	3.941.295	5.919.564	2.166.254	21.338.074
116	11.01.07.2004	LHOK PAWOH	SAWANG	8.318.324	4.627.123	4.845.779	17.756.993	6.498.141	42.046.360
117	11.01.07.2005	SAWANG II	SAWANG	13.027.279	634.541	3.495.534	5.919.564	2.166.254	25.243.172
118	11.01.07.2006	UJUNG KARANG	SAWANG	13.827.878	634.541	3.624.791	5.919.564	2.166.254	26.173.028
119	11.01.07.2007	TRIENG MEUDURO BAROH	SAWANG	39.444.491	634.541	4.028.044	5.919.564	2.166.254	52.192.894
120	11.01.07.2008	TRIENG MEUDURO TUNONG	SAWANG	12.344.852	634.541	3.926.112	5.919.564	2.166.254	24.991.323
121	11.01.07.2009	PANTON LUAS	SAWANG	8.318.324	634.541	4.351.819	5.919.564	2.166.254	21.390.502
122	11.01.07.2010	SIMPANG TIGA	SAWANG	8.318.324	634.541	5.120.571	5.919.564	2.166.254	22.159.254
123	11.01.07.2011	KUTA BARO	SAWANG	8.318.324	634.541	3.156.830	5.919.564	2.166.254	20.195.513
124	11.01.07.2012	BLANG GELINGGANG	SAWANG	8.318.324	634.541	4.014.050	5.919.564	2.166.254	21.052.733
125	11.01.07.2013	MUTIARA	SAWANG	8.318.324	634.541	4.204.954	5.919.564	2.166.254	21.243.637
126	11.01.07.2014	UJUNG PADANG	SAWANG	8.318.324	634.541	3.971.232	5.919.564	2.166.254	21.009.915
127	11.01.07.2015	SAWANG BA'U	SAWANG	8.318.324	5.412.608	3.835.110	65.106.707	23.825.689	106.498.438
128	11.01.08.2017	LHOK KEUTAPANG	TAPAKTUAN	20.651.643	634.541	6.309.586	5.919.564	2.166.254	35.681.588
129	11.01.08.2018	HILIR	TAPAKTUAN	34.141.354	36.475.291	9.494.649	297.011.382	108.690.820	485.813.496
130	11.01.08.2019	PADANG	TAPAKTUAN	14.150.164	634.541	3.368.399	5.919.564	2.166.254	26.238.922
131	11.01.08.2020	HULU	TAPAKTUAN	13.577.723	634.541	4.034.579	5.919.564	2.166.254	26.332.661
132	11.01.08.2021	JAMBO APHA	TAPAKTUAN	32.684.161	634.541	9.346.066	5.919.564	2.166.254	50.750.586
133	11.01.08.2022	TEPI AIR	TAPAKTUAN	33.042.257	634.541	3.637.503	5.919.564	2.166.254	45.400.119
134	11.01.08.2023	PASAR	TAPAKTUAN	10.108.801	19.833.599	5.543.585	78.255.723	28.637.549	142.379.257
135	11.01.08.2024	LHOK BENGKUANG	TAPAKTUAN	8.318.324	634.541	8.033.695	5.919.564	2.166.254	25.072.378
136	11.01.08.2009	PANTON LUAS	TAPAKTUAN	9.597.236	634.541	3.757.155	5.919.564	2.166.254	22.074.750
137	11.01.08.2010	GUNUNG KERAMBIL	TAPAKTUAN	8.318.324	634.541	4.762.520	5.919.564	2.166.254	21.801.203
138	11.01.08.2011	AIR BERUDANG	TAPAKTUAN	23.169.054	634.541	4.277.373	5.919.564	2.166.254	36.166.786

No	Kode Wilayah	Nama Gampong	Kecamatan	Pagu Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah					
				Bagi Hasil Pajak Daerah	Bagi Hasil Retribusi Daerah	BHPD Kurang Bayar Tahun 2024	BHRD Kurang Bayar Tahun 2024	BHRD Kurang Bayar Tahun 2023	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
139	11.01.08.2012	BATU ITAM	TAPAKTUAN	20.326.032	634.541	4.511.972	5.919.564	2.166.254	33.558.363
140	11.01.08.2013	PANJUPIAN	TAPAKTUAN	13.453.924	634.541	3.018.138	5.919.564	2.166.254	25.192.421
141	11.01.08.2014	LHOK RUKAM	TAPAKTUAN	17.373.023	1.068.911	3.538.777	10.062.664	3.682.415	35.725.790
142	11.01.08.2015	AIR PINANG	TAPAKTUAN	25.858.350	634.541	4.870.691	5.919.564	2.166.254	39.449.400
143	11.01.08.2016	LHOK BENGKUANG TIMUR	TAPAKTUAN	37.916.907	5.846.948	5.588.298	229.410.217	83.952.280	362.714.650
144	11.01.09.2001	KEUDE TRUMON	TRUMON	8.318.324	634.541	3.891.105	5.919.564	2.166.254	20.929.788
145	11.01.09.2002	UJONG TANOH	TRUMON	35.393.920	634.541	3.713.046	8.606.660	3.149.593	51.497.760
146	11.01.09.2003	SIGLENG	TRUMON	8.318.324	634.541	3.713.030	5.919.564	2.166.254	20.751.713
147	11.01.09.2004	IE MEUDAMA	TRUMON	8.318.324	634.541	4.575.636	5.919.564	2.166.254	21.614.319
148	11.01.09.2005	TEUPIN TINGGI	TRUMON	8.318.324	634.541	5.642.100	6.511.435	2.382.849	23.489.249
149	11.01.09.2006	KUTA BARO	TRUMON	20.416.834	634.541	3.455.979	5.919.564	2.166.254	32.593.172
150	11.01.09.2007	PANTON BILIE	TRUMON	8.318.324	634.541	4.239.557	5.919.564	2.166.254	21.278.240
151	11.01.09.2012	KUTA PADANG	TRUMON	8.318.324	634.541	3.218.265	6.428.573	2.352.525	20.952.228
152	11.01.09.2013	RAKET	TRUMON	8.318.324	634.541	3.324.110	5.919.564	2.166.254	20.362.793
153	11.01.09.2014	GAMPONG TEUNGOH	TRUMON	8.318.324	634.541	7.220.691	5.919.564	2.166.254	24.259.374
154	11.01.09.2015	SENEUBOK JAYA	TRUMON	8.318.324	634.541	5.509.166	5.919.564	2.166.254	22.547.849
155	11.01.09.2016	PADANG HARAPAN	TRUMON	8.318.324	634.541	3.900.468	5.919.564	2.166.254	20.939.151
156	11.01.10.2001	LADANG TEUNGOH	PASIE RAJA	8.318.324	634.541	3.274.979	5.919.564	2.166.254	20.313.662
157	11.01.10.2002	PUCOK KRUENG	PASIE RAJA	8.318.324	634.541	3.213.756	5.919.564	2.166.254	20.252.439
158	11.01.10.2003	SILOLO	PASIE RAJA	19.421.380	634.541	4.386.036	5.919.564	2.166.254	32.527.775
159	11.01.10.2004	KAMPUNG BARU	PASIE RAJA	16.786.770	634.541	3.746.831	5.919.564	2.166.254	29.253.960
160	11.01.10.2005	PANTON BILI	PASIE RAJA	8.318.324	634.541	3.543.252	5.919.564	2.166.254	20.581.935
161	11.01.10.2006	PAYA ATEUK	PASIE RAJA	8.318.324	634.541	3.731.856	5.919.564	2.166.254	20.770.539
162	11.01.10.2007	LADANG TUHA	PASIE RAJA	8.318.324	1.286.075	6.088.385	13.022.021	4.765.386	33.480.191
163	11.01.10.2008	MATA IE	PASIE RAJA	8.318.324	634.541	5.183.298	5.919.564	2.166.254	22.221.981
164	11.01.10.2009	UJONG BATEE	PASIE RAJA	11.367.251	634.541	4.212.630	5.919.564	2.166.254	24.300.240
165	11.01.10.2010	LHOK SIALANG CUT	PASIE RAJA	8.471.794	634.541	4.746.139	5.919.564	2.166.254	21.938.292
166	11.01.10.2011	SEUNEUBOK	PASIE RAJA	10.246.924	634.541	4.991.784	5.919.564	2.166.254	23.959.067
167	11.01.10.2012	IE MIRAH	PASIE RAJA	40.525.428	634.541	4.410.460	5.919.564	2.166.254	53.656.247
168	11.01.10.2013	PASIE RASIAN	PASIE RAJA	13.459.551	634.541	3.523.452	5.919.564	2.166.254	25.703.362
169	11.01.10.2014	UJUNG PADANG RASIAN	PASIE RAJA	8.318.324	634.541	4.328.549	5.919.564	2.166.254	21.367.232
170	11.01.10.2015	KRUENG KALEE	PASIE RAJA	8.318.324	634.541	3.689.834	5.919.564	2.166.254	20.728.517
171	11.01.10.2016	LHOK SIALANG RAYEUK	PASIE RAJA	8.318.324	634.541	6.648.006	5.919.564	2.166.254	23.686.689
172	11.01.10.2017	GAMPONG BARO	PASIE RAJA	9.315.876	634.541	3.727.467	5.919.564	2.166.254	21.763.702
173	11.01.10.2018	TEUPIN GAJAH	PASIE RAJA	8.318.324	634.541	5.615.405	5.919.564	2.166.254	22.654.088
174	11.01.10.2019	UJUNG PADANG ASAHAN	PASIE RAJA	8.318.324	634.541	2.970.213	5.919.564	2.166.254	20.008.896
175	11.01.10.2020	PULO IE II	PASIE RAJA	24.128.033	634.541	3.748.507	5.919.564	2.166.254	36.596.899
176	11.01.10.2021	PANTE RAJA	PASIE RAJA	8.318.324	634.541	4.194.799	5.919.564	2.166.254	21.233.482
177	11.01.11.2001	TENGAH PEULUMAT	LABUHANHAJI TIMUR	9.085.671	634.541	4.010.095	5.919.564	2.166.254	21.816.125
178	11.01.11.2002	PAYA PEULUMAT	LABUHANHAJI TIMUR	8.318.324	634.541	3.488.692	5.919.564	2.166.254	20.527.375
179	11.01.11.2003	PADANG PEULUMAT	LABUHANHAJI TIMUR	8.318.324	634.541	3.105.359	5.919.564	2.166.254	20.144.042
180	11.01.11.2004	AUR PEULUMAT	LABUHANHAJI TIMUR	9.469.345	634.541	3.434.041	5.919.564	2.166.254	21.623.745
181	11.01.11.2005	LIMAU SARING	LABUHANHAJI TIMUR	8.318.324	634.541	3.185.485	5.919.564	2.166.254	20.224.168
182	11.01.11.2006	BEUTONG	LABUHANHAJI TIMUR	8.318.324	634.541	3.305.570	5.919.564	2.166.254	20.344.253
183	11.01.11.2007	PEUNEULOP	LABUHANHAJI TIMUR	8.318.324	634.541	3.254.051	5.919.564	2.166.254	20.292.734
184	11.01.11.2008	GUNUNG ROTAN	LABUHANHAJI TIMUR	8.318.324	634.541	4.648.975	5.919.564	2.166.254	21.687.658
185	11.01.11.2009	KEUMUMU HILIR	LABUHANHAJI TIMUR	17.581.742	634.541	4.624.843	5.919.564	2.166.254	30.926.944
186	11.01.11.2010	KEUMUMU HULU	LABUHANHAJI TIMUR	8.318.324	634.541	3.020.287	5.919.564	2.166.254	20.058.970
187	11.01.11.2011	KEUMUMU SEBERANG	LABUHANHAJI TIMUR	12.950.340	634.541	3.083.561	5.919.564	2.166.254	24.754.260
188	11.01.11.2012	SAWANG INDAH	LABUHANHAJI TIMUR	8.574.107	634.541	3.792.968	5.919.564	2.166.254	21.087.434
189	11.01.12.2001	TUTONG	LABUHANHAJI BARAT	25.735.677	634.541	6.651.997	5.919.564	2.166.254	41.108.033
190	11.01.12.2002	TENGAH IBOH	LABUHANHAJI BARAT	28.158.346	634.541	5.533.341	5.919.564	2.166.254	42.412.046
191	11.01.12.2003	PEULOKAN	LABUHANHAJI BARAT	37.351.664	634.541	4.160.312	5.919.564	2.166.254	50.232.335
192	11.01.12.2004	KUTA IBOH	LABUHANHAJI BARAT	29.342.210	634.541	4.800.056	5.919.564	2.166.254	42.862.625
193	11.01.12.2005	UJUNG PADANG	LABUHANHAJI BARAT	8.318.324	634.541	4.618.998	5.919.564	2.166.254	21.657.681
194	11.01.12.2006	BLANG BARU	LABUHANHAJI BARAT	20.523.240	634.541	4.403.231	5.919.564	2.166.254	33.646.830
195	11.01.12.2007	BLANG POROH	LABUHANHAJI BARAT	15.503.765	634.541	3.918.796	5.919.564	2.166.254	28.142.920
196	11.01.12.2008	PULO IE	LABUHANHAJI BARAT	8.522.950	634.541	3.073.903	5.919.564	2.166.254	20.317.212
197	11.01.12.2009	SUAK LOKAN	LABUHANHAJI BARAT	14.060.640	634.541	6.531.898	5.919.564	2.166.254	29.312.897
198	11.01.12.2010	IKU LHUENG	LABUHANHAJI BARAT	34.285.359	634.541	3.430.766	5.919.564	2.166.254	46.436.484
199	11.01.12.2011	KUTA TRIENG	LABUHANHAJI BARAT	11.505.374	634.541	8.383.061	5.919.564	2.166.254	28.608.794
200	11.01.12.2012	PANTE GEULIMA	LABUHANHAJI BARAT	8.870.814	634.541	4.047.124	5.919.564	2.166.254	21.638.297
201	11.01.12.2013	PANTON PAWOH	LABUHANHAJI BARAT	40.209.281	634.541	4.465.107	5.919.564	2.166.254	53.394.747
202	11.01.12.2014	BATEE MEUCANANG	LABUHANHAJI BARAT	21.196.971	634.541	2.892.424	5.919.564	2.166.254	32.809.754
203	11.01.12.2015	PANTON RUBEEK	LABUHANHAJI BARAT	20.448.551	634.541	3.926.483	5.919.564	2.166.254	33.095.393
204	11.01.13.2001	KOTO	KLUET TENGAH	8.318.324	1.286.095	4.429.215	11.246.407	4.115.603	29.395.644
205	11.01.13.2002	ALUR KEUJRUN	KLUET TENGAH	9.696.992	634.541	3.075.961	5.919.564	2.166.254	21.493.312
206	11.01.13.2003	JAMBOR PAPAN	KLUET TENGAH	8.318.324	634.541	3.574.984	5.919.564	2.166.254	20.613.667
207	11.01.13.2004	MALAKA	KLUET TENGAH	8.318.324	634.541	4.505.038	5.919.564	2.166.254	21.543.721
208	11.01.13.2005	KOTO INDARUNG	KLUET TENGAH	22.298.135	634.541	3.410.299	5.919.564	2.166.254	34.428.793
209	11.01.13.2006	SIURAI-URAI	KLUET TENGAH	12.548.966	634.541	3.037.278	5.919.564	2.166.254	24.306.603
210	11.01.13.2007	KAMPUNG SAWAH	KLUET TENGAH	8.318.324	634.541	3.996.558	5.919.564	2.166.254	21.035.241
211	11.01.13.2008	KAMPUNG PADANG	KLUET TENGAH	8.318.324	634.541	4.160.445	5.919.564	2.166.254	21.199.128
212	11.01.13.2009	PULO AIR	KLUET TENGAH	14.475.519	634.541	3.048.672	5.919.564	2.166.254	26.244.550

No	Kode Wilayah	Nama Gampong	Kecamatan	Pagu Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah					
				Bagi Hasil Pajak Daerah	Bagi Hasil Retribusi Daerah	BHPD Kurang Bayar Tahun 2024	BHRD Kurang Bayar Tahun 2024	BHRD Kurang Bayar Tahun 2023	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
213	11.01.13.2010	LAWE MELANG	KLUET TENGAH	8.318.324	634.541	3.249.353	5.919.564	2.166.254	20.288.036
214	11.01.13.2011	MERSAK	KLUET TENGAH	10.973.346	634.541	2.901.441	5.919.564	2.166.254	22.595.146
215	11.01.13.2014	SIMPANG DUA	KLUET TENGAH	26.026.655	634.541	4.184.773	5.919.564	2.166.254	38.931.787
216	11.01.13.2015	SIMPANG TIGA	KLUET TENGAH	9.832.556	634.541	3.218.503	5.919.564	2.166.254	21.771.418
217	11.01.14.2001	PAYA DAPUR	KLUET TIMUR	22.606.332	670.738	4.735.670	5.919.564	2.166.254	36.098.558
218	11.01.14.2002	SAPIK	KLUET TIMUR	8.318.324	634.541	6.236.568	5.919.564	2.166.254	23.275.251
219	11.01.14.2003	ALAI	KLUET TIMUR	18.749.133	634.541	4.257.727	5.919.564	2.166.254	31.727.219
220	11.01.14.2004	DURIAN KAWAN	KLUET TIMUR	32.349.086	670.738	6.632.120	5.919.564	2.166.254	47.737.762
221	11.01.14.2005	LAWE SAWAH	KLUET TIMUR	8.318.324	634.541	4.777.422	5.919.564	2.166.254	21.816.105
222	11.01.14.2006	LAWE BULUH DIDI	KLUET TIMUR	8.318.324	634.541	3.469.149	5.919.564	2.166.254	20.507.832
223	11.01.14.2007	PUCUK LEMBANG	KLUET TIMUR	8.318.324	670.738	6.961.775	5.919.564	2.166.254	24.036.655
224	11.01.14.2008	PAYA LABA	KLUET TIMUR	92.278.916	634.541	4.724.404	5.919.564	2.166.254	105.723.679
225	11.01.14.2009	LAWE CIMANOK	KLUET TIMUR	21.659.119	670.738	4.434.471	6.274.687	2.296.211	35.335.226
226	11.01.15.2001	SEUBADEH	BAKONGAN TIMUR	9.392.610	634.541	3.452.044	8.287.050	3.032.632	24.798.877
227	11.01.15.2002	LADANG RIMBA	BAKONGAN TIMUR	33.193.168	634.541	3.581.661	5.919.564	2.166.254	45.495.188
228	11.01.15.2003	UJONG PULO RAYEUK	BAKONGAN TIMUR	8.318.324	634.541	10.072.800	5.919.564	2.166.254	27.111.483
229	11.01.15.2004	SAWAH TINGKEUM	BAKONGAN TIMUR	8.318.324	634.541	2.806.003	5.919.564	2.166.254	19.844.686
230	11.01.15.2005	SIMPANG	BAKONGAN TIMUR	8.318.324	634.541	4.420.022	5.919.564	2.166.254	21.458.705
231	11.01.15.2006	UJONG PULO CUT	BAKONGAN TIMUR	12.625.701	634.541	3.121.641	5.919.564	2.166.254	24.467.701
232	11.01.15.2008	SEULEUKAT	BAKONGAN TIMUR	8.318.324	634.541	4.312.288	5.919.564	2.166.254	21.350.971
233	11.01.16.2005	PINTO RIMBA	TRUMON TIMUR	8.318.324	634.541	2.859.001	5.919.564	2.166.254	19.897.684
234	11.01.16.2006	KRUENG LUAS	TRUMON TIMUR	8.318.324	1.865.255	3.410.629	9.470.793	3.465.820	26.530.821
235	11.01.16.2007	JAMBO DALEM	TRUMON TIMUR	8.318.324	634.541	3.386.015	5.919.564	2.166.254	20.424.698
236	11.01.16.2008	KAPA SEUSAK	TRUMON TIMUR	8.318.322	634.541	38.681.205	5.919.564	2.166.254	55.719.886
237	11.01.16.2009	SEUNEUBOK PUNTO	TRUMON TIMUR	18.181.296	634.541	2.514.621	5.919.564	2.166.254	29.416.276
238	11.01.16.2010	SEUNEUBOK PUSAKA	TRUMON TIMUR	8.318.324	634.541	2.668.752	5.919.564	2.166.254	19.707.435
239	11.01.16.2011	ALUE BUJOK	TRUMON TIMUR	8.318.324	634.541	3.203.612	5.919.564	2.166.254	20.242.295
240	11.01.16.2012	TITI POBEN	TRUMON TIMUR	8.318.324	634.541	3.134.642	5.919.564	2.166.254	20.173.325
241	11.01.17.2001	BUKET GADENG	KOTA BAHAGIA	12.707.552	1.242.659	4.476.528	8.760.547	3.205.907	30.393.193
242	11.01.17.2002	RAMBONG	KOTA BAHAGIA	13.971.116	634.541	3.462.839	5.919.564	2.166.254	26.154.314
243	11.01.17.2003	SEUNEUBOK KEURANJI	KOTA BAHAGIA	8.318.324	634.541	3.440.709	5.919.564	2.166.254	20.479.392
244	11.01.17.2004	SEUNEUBOK ALUR BULOH	KOTA BAHAGIA	8.318.324	634.541	2.825.750	5.919.564	2.166.254	19.864.433
245	11.01.17.2005	UJONG TANOH	KOTA BAHAGIA	8.318.336	634.541	4.770.277	5.919.642	2.166.254	21.809.050
246	11.01.17.2006	UJONG GUNONG CUT	KOTA BAHAGIA	8.318.324	634.541	3.258.619	5.919.564	2.166.254	20.297.302
247	11.01.17.2007	UJONG GUNONG RAYEUK	KOTA BAHAGIA	8.318.324	634.531	4.149.889	5.919.564	2.166.254	21.188.562
248	11.01.17.2008	BEUTONG	KOTA BAHAGIA	8.318.324	634.531	3.122.562	5.919.564	2.166.254	20.161.235
249	11.01.17.2009	JAMBO KEUPOK	KOTA BAHAGIA	19.997.351	634.536	4.250.757	5.919.564	2.166.254	32.968.462
250	11.01.17.2010	ALUR_DUAMAS	KOTA BAHAGIA	8.318.324	634.541	5.363.490	5.919.564	2.166.254	22.402.173
251	11.01.18.2001	LADANG RIMBA	TRUMON TENGAH	8.318.324	2.010.035	3.121.558	14.797.635	5.415.169	33.662.721
252	11.01.18.2002	GUNONG KAPHO	TRUMON TENGAH	10.154.638	634.541	3.834.581	5.919.564	2.166.254	22.709.578
253	11.01.18.2003	KAMPONG TEUNGOH	TRUMON TENGAH	8.318.324	634.531	2.747.753	5.919.564	2.166.254	19.786.426
254	11.01.18.2004	KRUENG BATEE	TRUMON TENGAH	8.318.324	634.539	3.693.252	5.919.564	2.166.254	20.731.933
255	11.01.18.2005	PULO PAYA	TRUMON TENGAH	8.318.324	634.539	4.025.291	5.919.564	2.166.254	21.063.972
256	11.01.18.2006	JAMBO PAPEUN	TRUMON TENGAH	8.318.324	634.539	3.366.164	5.919.564	2.166.254	20.404.845
257	11.01.18.2007	COT BAYU	TRUMON TENGAH	8.318.324	634.539	5.047.572	5.919.564	2.166.254	22.086.253
258	11.01.18.2008	NACA	TRUMON TENGAH	19.544.002	634.540	4.849.641	5.919.564	2.166.267	33.114.014
259	11.01.18.2009	IE JEUREUNEH	TRUMON TENGAH	8.318.324	634.539	5.133.238	5.919.564	2.166.274	22.171.939
260	11.01.18.2010	LHOK RAYA	TRUMON TENGAH	8.318.324	634.539	4.149.888	5.919.564	2.166.274	21.188.589
Total				3.604.607.105	274.967.696	1.089.669.072	2.565.144.357	938.710.161	8.473.098.391

BUPATI ACEH SELATAN,

MIRWAN MS